

PROSEDUR PENGENDALIAN PIUTANG PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK SOEJATNA, MULYANA & REKAN

Rima Fitriani, Dr. Ir. Budi Hermana, MM

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ekonomi, 2009

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci : piutang

Abstraksi :

Penjualan merupakan aktivitas penting dan utama pada suatu perusahaan. Penjualan secara umum terdiri dari penjualan kredit dan penjualan tunai. Pada penjualan kredit, pembayaran dan transaksi tersebut memerlukan kesepakatan dari berbagai pihak atas barang atau jasa yang ditawarkan atau lazimnya disebut dengan hubungan hutang piutang. Mengingat piutang merupakan aktiva perusahaan yang sangat penting maka diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang baik hal ini agar penyimpangan yang mungkin terjadi dapat diminimalisasi. Adapun tujuan yang diharapkan melalui praktek kerja lapangan yang dilakukan antara lain: 1) Memahami proses terjadinya pencatatan piutang perusahaan, 2) Memahami sistem dan prosedur penerimaan kas dari pendapatan jasa yang masih harus diterima (piutang), dan 3) Memahami praktik prosedur pengendalian piutang Berdasarkan hasil dari laporan kerja praktek ini diketahui bahwa 1) Bagian Terkait dalam Prosedur Penerimaan Order Hingga Penerimaan Kas dari pendapatan jasa yang masih harus diterima (Piutang) adalah Pimpinan Rekan, Divisi Layanan, Bagian Sekretariat, Bagian Kasa, Bagian Jurnal, dan Bagian Penagihan. 2) Dokumen yang Digunakan dalam Pencatatan Penerimaan Kas dari Pendapatan Jasa yang Masih Harus Diterima (Piutang) adalah Berita acara serah terima pekerjaan, Dokumen perjanjian kerja sama, Surat Pemberitahuan, Daftar surat pemberitahuan, Bukti setor bank dan Tanda terima. 3) Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Piutang adalah Fungsi Sekretariat, Fungsi Penagihan, Fungsi Kas, Fungsi Akuntansi, dan Fungsi Pemeriksaan intern. Simpulan dari laporan kerja praktek ini berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan telah menerapkan sistem pengendalian intern dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya pemisahan fungsi penagihan dengan fungsi penerimaan kas, demikian pula adanya pemisahan fungsi pembuat daftar piutang yang harus ditagih dengan fungsi penagihan